

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim saat ini menjadi sebuah Isu global yang menyentuh perhatian berbagai kalangan di dunia mulai dari ilmuwan, peneliti, akademisi, aktivis lingkungan sampai pada kalangan masyarakat. Perubahan iklim ini sebenarnya bukan hal baru yang muncul begitu saja, melainkan telah ada selama puluhan ribu tahun. Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2013, dalam satu abad terakhir terjadi peningkatan pemanasan global akibat meningkatnya produksi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang berasal dari berbagai sektor yaitu energi, lahan dan hutan, pertanian, industri, dan limbah, serta aktivitas manusia di sektor peternakan yang menghasilkan gas metana. Semua hal tersebut memicu terjadinya pemanasan global sehingga berpengaruh terhadap pola iklim global. Ini menekankan bahwa manusia telah berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global, terutama sejak era industri. Subandono Diposaptono (2013) mendeskripsikan perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka waktu panjang (50 sampai 100 tahun) yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Perubahan iklim akibat pemanasan global ini juga menyebabkan suhu bumi meningkat dan berakibat pada mencairnya gletser, salju di puncak gunung, serta lapisan es di Kutub Utara dan Selatan mencair. Hal itu berdampak pada naiknya permukaan air laut sehingga menempatkan daerah pesisir dalam kondisi kian tak stabil dan rentan berbagai macam bencana, tak terkecuali banjir rob (banjir di tepi pantai). Isu ini menjadi perhatian banyak kalangan dikarenakan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial manusia dan lingkungan. Laporan IPCC menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim akan menjangkau semua kawasan di dunia tanpa terkecuali, termasuk wilayah pesisir.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 80.000 kilometer garis pantai, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada kenaikan muka air laut. Kenaikan permukaan air 1 meter saja dapat menenggelamkan 405.000 hektar wilayah

pesisir dan menenggelamkan 2.000 pulau yang terletak dekat permukaan laut beserta kawasan terumbu karang. Kenyataannya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakatnya, karena hampir 70 persen penduduk Indonesia tinggal dan menggantungkan kehidupannya di wilayah tersebut. Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang menopang banyak aktivitas manusia karena memiliki ekosistem dan sumber daya yang kaya dan melimpah akan tetapi kondisi tersebut berbanding lurus dengan kondisinya yang saat ini sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan, salah satunya karena perubahan iklim.

Subandono Diposaptono (2013) menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Perubahan fisik tersebut tentunya berimbas pada segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan dan kondisi sosial-ekonomi maupun budaya masyarakat. Sebagai contoh kasus yang terjadi di pulau Pulau Panjang, Natuna, Kepulauan Riau, perubahan iklim menyebabkan perubahan kalender musim, hewan penanda musim dan meningkatnya intensitas badai di laut. Hilangnya biodiversitas lokal serta meningkatnya ancaman bencana yang mengganggu aktivitas penangkapan ikan Styawan (2024). Selain itu, dampak langsung perubahan iklim di daerah pesisir, yaitu semakin tingginya risiko melaut di tengah ketidakpastian cuaca sehingga dapat menyebabkan nelayan tidak lagi dapat melaut, sehingga mengalami penurunan hasil tangkapan bahkan kemungkinan buruknya, nelayan bisa kehilangan mata pencaharian utamanya.

Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan nyata akibat perubahan iklim adalah Pulau Barrang Lompo, sebuah pulau kecil yang terletak di gugusan Kepulauan Spermonde, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nyompa et al., (2019) menemukan bahwa pekerjaan pokok yang paling banyak dilakukan penduduk pulau ini adalah nelayan sawi mencapai 631 orang atau 33,47%, menyusul pengurus rumah tangga sebanyak 28,33%. Sedangkan pekerjaan sampingan baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak terlibat pada pekerjaan jualan

karna pekerjaan ini tidak banyak membutuhkan tenaga hanya perlu modal usaha yang dipersiapkan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyompa et al., (2019) menunjukkan bahwa pekerjaan utama responden adalah nelayan (100 persen) walaupun ada 3 orang (3,66 persen) yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang. Penelitian dari Tahir et al., (2009), menggambarkan secara jelas bahwa pulau Barrang Lompo memiliki indeks kerentanan kategori sedang (8,27–8,33). Pulau tersebut sangat rentan terhadap perendaman akibat kenaikan muka laut, dengan proyeksi lebih dari 80% daratan akan terendam pada tahun 2100 jika tidak ada upaya adaptasi. Penelitian lain dari Idrus et al., (2024) mengatakan bahwa tingkat kerentanan Pulau Barrang Lompo tergolong tinggi, terutama dari sisi ekonomi nelayan. Kerentanan ini dipicu oleh ketergantungan pada satu sumber penghasilan, minimnya diversifikasi mata pencaharian, dan kapasitas adaptif yang masih rendah.

Berdasarkan hasil observasi awal di Pulau tersebut, masyarakat pesisir terutama nelayan telah merasakan berbagai macam akibat atau dampak dari perubahan iklim. Dimulai dari peningkatan cuaca ekstrem, seperti angin kencang atau badai yang mengakibatkan cuaca tidak menentu atau sulit untuk diprediksi sehingga membuat nelayan terkadang menghadapi kesulitan saat melaut. Selain itu, penurunan jumlah tangkapan sumber daya laut seperti ikan dan teripang turut dirasakan oleh nelayan yang akhirnya memengaruhi kondisi ekonomi nelayan. Ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya perubahan iklim dapat mengganggu kestabilan ekosistem laut, kondisi sosial, serta mata pencaharian masyarakat pesisir terutama yang berperan sebagai nelayan. Kondisi-kondisi tersebut diperparah dengan ketergantungan kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat pesisir terhadap kondisi lingkungan, mengindikasikan bagaimana perubahan iklim merupakan suatu ancaman yang cukup rentan bagi keberlangsungan hidup mereka.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat tidak selalu bersikap pasif. Justru dalam banyak kasus, mereka menunjukkan kapasitas untuk bertahan, beradaptasi, bahkan berinovasi secara lokal. Konsep *resiliensi sosial-ekologis* menjadi lensa penting untuk memahami bagaimana sistem sosial (masyarakat) dan sistem ekologis (lingkungan) saling terintegrasi dan saling memengaruhi dalam menghadapi tekanan perubahan iklim. Resiliensi sosial-ekologis bukan

hanya soal ketangguhan fisik, tetapi juga mencakup pengetahuan lokal, praktik sosial, serta nilai-nilai budaya yang membentuk cara masyarakat merespons perubahan. Menurut Speranza et al. (2014) resiliensi mengacu pada serangkaian tindakan yang berkaitan dengan kapasitas individu, kelompok, atau sistem ekologi sosial masyarakat dalam menahan tekanan serta meningkatkan kapasitas dengan berbagai pendekatan sebagai respons adanya perubahan iklim. Defenisi lain yang dikemukakan oleh Gallopin (2006, sebagaimana dikutip dalam Wahyono et al., (2014) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan sistem sosial untuk tetap berfungsi dan mempertahankan identitasnya meski harus melakukan reorganisasi akibat adanya perubahan.

Penelitian sebelumnya yang serupa mengenai resiliensi sosial-ekologis, seperti studi Untari (2023) di Masyarakat Pesisir di Distrik Merauke dan Naukenjerai, Merauke-Papua Selatan yang menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa nelayan, baik lokal maupun non-lokal, memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dibanding kelompok lain seperti petani dan sektor jasa. Hal ini terkait dengan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perubahan ekosistem pesisir. Disisi lain, studi dari Subair et al., (2015) menggambarkan kondisi Masyarakat nelayan di di Desa Asilulu, Pulau Ambon yang merespon perubahan iklim melalui strategi nafkah. Mereka mengoptimalkan penggunaan berbagai modal—baik alami, fisik, manusia, keuangan, maupun sosial—untuk membangun sistem nafkah yang berkelanjutan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Penelitian dari Maroddin et al., (2022) menyoroti bahwa kedua kelompok nelayan tradisional dan modern mengalami perubahan lingkungan, sosial ekonomi, dan infrastruktur, serta meresponsnya melalui mekanisme adaptasi yang berbeda. Resiliensi yang dicapai meliputi tingkat stabilitas dengan memanfaatkan tabungan untuk bertahan saat tidak melaut, tingkat pemulihan dengan mencari sumber penghasilan alternatif, dan tingkat transformasi yang dicapai komunitas nelayan modern melalui peningkatan kapasitas fisik dan teknologi kapal.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah mengambil pendekatan sosial-ekologis secara utuh, artinya fokus pada keterkaitan antara sistem sosial (nilai budaya, struktur sosial, pengetahuan lokal, kelembagaan) dan sistem ekologi (ekosistem pesisir, sumber daya alam) dalam membentuk resiliensi terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian ini dibangun

untuk bagaimana melihat masyarakat pesisir sebagai sebuah sistem sosial-ekologis yang saling berinteraksi dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Selain itu kajian yang menggali narasi lokal, pengalaman warga, serta bentuk-bentuk resiliensi yang tumbuh dari bawah masih terbatas. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang secara khusus memfokuskan diri pada masyarakat pesisir di pulau kecil seperti Barrang Lompo dalam konteks resiliensi sosial-ekologis. Hal ini menciptakan celah penelitian yang penting untuk diisi, terutama guna merumuskan strategi atau model resiliensi yang relevan dan berbasis konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak perubahan iklim pada masyarakat Pulau Barrang Lompo dan mengidentifikasi bentuk-bentuk resiliensi sosial-ekologis yang dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Pulau Barrang Lompo dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa jenis-jenis masalah lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Pulau Barrang Lompo?
2. Bagaimana bentuk-bentuk resiliensi sosial-ekologis yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim?
3. Apa dan bagaimana keberhasilan bentuk-bentuk resiliensi sosial-ekologis masyarakat pesisir di Pulau Barrang Lompo terhadap dampak perubahan iklim ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk masalah lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Pulau Barrang Lompo.
2. Menggambarkan bentuk-bentuk resiliensi sosial-ekologis yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

3. Menilai dan menganalisis keberhasilan dari bentuk-bentuk resiliensi sosial-ekologis masyarakat pesisir di Pulau Barrang Lompo terhadap dampak perubahan iklim.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait bentuk-bentuk resiliensi sosial-ekologis masyarakat pesisir khususnya di Pulau Barrang Lompo terhadap dampak perubahan iklim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah, LSM, maupun lembaga pengelola lingkungan untuk merancang kebijakan atau program adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas lokal masyarakat pesisir. Selain itu penelitian ini dapat mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, terutama melalui dokumentasi praktik lokal yang berhasil dan dapat direplikasi atau dikembangkan.

1.5 Tinjauan Konseptual

1.5.1 Konsep Resiliensi Sosial-Ekologis

Resiliensi sosial-ekologis dipahami sebagai kapasitas sistem sosial-ekologi untuk menyerap gangguan seperti dampak dari perubahan iklim dan beradaptasi sambil tetap mempertahankan fungsi, struktur dan identitasnya. Menurut Holling, (1973); Folke (2006) dalam Shaleh et al.,(2014) Resiliensi adalah kemampuan dari sistem ekologi atau sistem ekologi-sosial tertentu untuk dapat bertahan dari gangguan dengan cara menyerap dan mengarahkannya sehingga keadaan variabel dalam sistem tidak berubah. Pada konteks sistem sosial, kemampuan tersebut bisa berasal dari suatu komunitas tertentu dalam upayanya mengatasi berbagai tekanan eksternal sebagai akibat perubahan lingkungan, sosial, dan politik. Adger (2000) juga menegaskan bahwa pada kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada sumberdaya alam (seperti nelayan), resiliensi sosial tidak terpisahkan

dari resiliensi ekologi, yaitu bagaimana sistem ekologi berfungsi dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Konsep resiliensi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kapasitas adaptif, sesuai dengan yang dikatakan Tuller et al., (2008) bahwa resiliensi merupakan kemampuan sistem sosial untuk pulih dari tekanan atau gangguan melalui proses adaptasi, penanganan masalah (coping), serta penyesuaian diri. Lebih lanjut, resiliensi muncul sebagai bentuk respons, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana, setelah mengalami suatu paparan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman di masa depan. Oleh karena itu, kondisi resiliensi berkaitan erat dengan perubahan iklim dan adaptasinya, dimana semakin tinggi resiliensi suatu komunitas maka semakin baik mereka dalam mencegah, menghadapi, maupun memanfaatkan dampak perubahan iklim yang terduga maupun tidak terduga Berbés-Blázquez et al., (2017). Menurut Adger (2000) resiliensi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ketahanan sistem terhadap guncangan, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, serta kapasitas untuk menghadapi perubahan tanpa kehilangan fungsi inti sistem.

1.5.2 Perubahan Iklim dan dampaknya terhadap wilayah pesisir

Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, sehingga terjadi pemanasan global. Pemanasan global di samping mengakibatkan perubahan iklim juga akan berdampak pada kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut akibat dari pemanasan global dapat menyebabkan wilayah pesisir terendam, pulau-pulau kecil tenggelam, erosi pantai, abrasi pantai, intrusi air laut serta kerusakan infrastruktur pemukiman penduduk di wilayah pesisir. Disamping itu juga bisa menyebabkan hal yang lebih buruk seperti penurunan produktivitas perikanan, terjadi pengungsian penduduk, sumber air bersih sulit, frekuensi dan intensitas banjir meningkat, luas daratan berkurang, dan ancaman terhadap aktivitas kegiatan sosial ekonomi Masyarakat pesisir akan terancam. Silalahi (2022) menyimpulkan bahwa secara global ancaman perubahan iklim terhadap wilayah pesisir menyebabkan terjadinya

kenaikan permukaan air laut, perubahan pola hidrologi, pola angin, perubahan suhu dan keasaman air laut.

Kenaikan muka air laut, badai, dan gelombang tinggi membawa dampak terhadap komunitas di kawasan pesisir tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Berbagai perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan ekologis, antara lain intrusi air laut ke daratan; gelombang ekstrim dan badai; genangan dan banjir; erosi pantai; kerusakan terumbu karang; perubahan proses upwelling, perubahan pola migrasi dan gerombolan ikan; perubahan morfologi pantai dan mangrove; meningkatnya salinitas air; kerusakan lahan budidaya perikanan dan sumber-sumber air tawar; serta meningkatnya frekuensi dan intensitas badai di lautan. Perubahan fisik tersebut tentunya mengimbas pada segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik tersebut berdampak pada morfologi pantai ekosistem alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan dan kondisi sosial-ekonomi maupun budaya masyarakat Subandono Diposaptono (2013). Sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan upaya penyelamatan segera guna mencegah kerusakan lanjutan pada ekosistem dan biota perairan yang juga berperan dalam menjaga stabilitas iklim.

1.5.3 Masyarakat Pesisir sebagai Aktor Resiliensi

Masyarakat pesisir adalah kesatuan-kesatuan manusia berupa kelompok Masyarakat yang tinggal di wilayah pertemuan antara daratan dan laut yang sepenuhnya atau sebagian besar kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan sumber daya laut. Menurut Yistiarani (2020) masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dapat disebut sebagai masyarakat pesisir. Kelompok masyarakat ini terdiri dari beragam profesi tentunya, mulai dari nelayan, pedagang, pembudidaya ikan hingga petambak. Dari beragam profesi yang ada, nelayan menjadi profesi yang mayoritas dijalankan oleh Masyarakat pesisir dan paling banyak memanfaatkan hasil laut sebagai penopang kelangsungan hidupnya.

Wibowo (2010) mengatakan bahwa Masyarakat pesisir terutama yang berada di pulau-pulau kecil memiliki karakteristik sistem ekonomi dan sosial-budaya yang tidak jauh berbeda dengan nelayan pada umumnya. Akan tetapi, yang membedakan solidaritas masyarakat pesisir pada umumnya dan pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil sangat kuat solidaritas sosialnya dikarenakan kondisi geografi dan akses yang menjadikan mereka harus berjuang bersama dalam bertahan hidup. Masyarakat pulau-pulau kecil berkonfrontasi pada kondisi yang hampir secara keseluruhan aspek kehidupannya berhubungan dengan laut. Bisa terlihat dari akses transportasi menuju pulau, masuknya logistik, dan sumber mata pencaharian serta sumber daya alam terbesar adalah hasil dari laut.

Masyarakat pesisir seringkali menjadi pihak yang paling rentan sekaligus paling adaptif terhadap perubahan iklim karena ketergantungan langsung pada sumber daya alam. Menurut Cinner et al.,(2018), ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi Masyarakat pesisir meliputi :

1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam

Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan tinggi pada ekosistem laut, mulai dari pangan hingga mata pencaharian untuk menopang kebutuhan dasar. Tetapi, ketergantungan ini juga menjadi “pedang bermata dua”. Di satu sisi, sumber daya laut menjadi penopang punggung ekonomi; di sisi lain, goncangan ekosistem yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat mengganggu stabilitas sosial-ekonomi.

2. Pengetahuan lokal dan Kearifan Tradisional

Pengetahuan lokal adalah “modal tak kasat mata” yang memungkinkan masyarakat pesisir bertahan dalam ketidakpastian. Cinner et al., (2018) menegaskan bahwa masyarakat dengan pengetahuan lokal yang kuat cenderung lebih Tangguh karena mampu merespons perubahan dengan solusi yang teruji waktu.

3. Akses ke infrastruktur dan Teknologi

Infrastruktur dasar dan teknologi berupa alat navigasi modern dapat memperkuat kapasitas adaptif.

4. Jaringan Sosial dan Solidaritas Komunitas

Jaringan sosial yang kuat, baik di tingkat lokal maupun lintas komunitas, menjadi "jaring pengaman" saat krisis. Gotong royong, sistem bagi hasil (sharing economy), dan komunikasi yang intensif memungkinkan redistribusi sumber daya dan informasi. Cinner et al., (2018) menemukan bahwa komunitas dengan kohesi sosial tinggi lebih cepat pulih ketika menghadapi sebuah bencana.

5. Peran Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah

Kelembagaan yang responsif (baik formal seperti pemerintah daerah maupun informal seperti LSM atau kelompok adat) berperan sebagai fasilitator resiliensi.

Dalam masyarakat pesisir, resiliensi sosial-ekologis tercermin dari bagaimana masyarakat membangun hubungan ekosistem laut sebagai sumber utama, hingga pola mata pencaharian mereka yang menyesuaikan diri dengan musim, cuaca, dan dinamika lingkungan. Resiliensi juga ditunjukkan melalui kekuatan jaringan sosial, keberadaan nilai gotong royong, dan bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.

1.5.4 Antropologi Ekologi

Antropologi ekologi (*ecological anthropology*) merupakan spesialisasi di dalam antropologi yang menurut Julian Steward khusus mempelajari atau menjelaskan asal-usul, ciri-ciri dan pola-pola budaya tertentu yang tampak di berbagai daerah yang berlainan. Seiring dengan perkembangan ilmu, antropologi ekologi kini mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan dinamis. Pendekatan modern dalam antropologi ekologi tidak hanya mempelajari bagaimana lingkungan memengaruhi masyarakat manusia, tetapi juga menyoroti peran aktif manusia dalam mengubah dan mempengaruhi lingkungan mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti

eksploitasi sumber daya alam, dampak perubahan iklim, serta proses urbanisasi yang terus berkembang. Pendekatan ini menegaskan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik dan saling memengaruhi, sehingga memerlukan analisis yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memahami dinamika tersebut secara mendalam. Lebih lanjut Antropologi Ekologi mempelajari bagaimana budaya dan tradisi berkembang sebagai respon terhadap kondisi lingkungan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya Moun Eerland (2020). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Etnografi. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami cara hidup atau pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsinya mengenai dunianya. Disamping mempelajari masyarakat, etnografi juga berarti belajar dari masyarakat Spradley & McCurdy (2019).

Etnografi dipilih untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam kebudayaan manusia sesuai dengan hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dengan berfokus pada permasalahan penelitiannya. Mengacu pada beberapa pendapat ahli tersebut, metode etnografi relevan digunakan pada penelitian ini karena peneliti ingin memperoleh pemahaman secara mendalam dan utuh terkait resiliensi sosial-ekologis masyarakat pesisir di Pulau Barrang Lompo terhadap dampak perubahan iklim.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu dari kepulauan Spermonde yaitu Pulau Barrang Lompo. Pulau Barrang Lompo terletak di sisi barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau Barrang Lompo merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah. Jarak yang mesti ditempuh untuk menuju pulau ini sekitar kurang lebih 11 kilometer dari kota Makassar.

Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan salah satu wilayah pesisir yang rentan sekaligus terdampak oleh perubahan iklim dan memiliki

ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut. Selain itu, minimnya kajian terhadap masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim khususnya terkait dengan bentuk resiliensinya pada wilayah tersebut.

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Juni-Oktober tahun 2025 mencakup proses observasi lapangan, wawancara, dan analisis data. Penelitian berlangsung selama musim timur sampai memasuki awal musim barat untuk melihat dan mengamati langsung bagaimana dampak perubahan iklim pada kedua musim di Pulau tersebut.

2.3 Informan Penelitian

Penentuan Informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti akan memilih informan yang sekiranya mampu memberikan informasi relevan terhadap fokus penelitiannya. Beberapa kriteria informan adalah warga lokal pesisir yang meliputi nelayan baik yang berperan sebagai *pinggawa* maupun *sawi*, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa/kelurahan serta pedagang atau pelaku usaha pesisir yang ada di wilayah pesisir tersebut. Adapun informan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Keterangan
1	H.Baha	Laki-laki	64	Juragan Darat
2	Pak Edi Kukang	Laki-laki	60	Nelayan Cumi-cumi
3	Pak H.Ramli	Laki-laki	54	Sawi Ikan
4	Pak Kaco	Laki-Laki	51	Sawi teripang & Mantan Penyelam
5	Ismail Muhtar	Laki-laki	28	Sekretaris Komunitas SOD & Warga lokal
6	Pak Irwan	Laki-laki	50	Juragan teripang
7	Ibu Kartini	Perempuan	34	Penjaja kudapan & Istri Nelayan

Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam dan dokumentasi.

2.4.1 Observasi Partisipatif

Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa dalam observasi partisipatif peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dalam konteks penelitian ini, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung seperangkat kegiatan yang dilakukan para informan di wilayah masyarakat pesisir. Peneliti terlebih dahulu mencari informasi dan memetakan lokasi pemusatan aktivitas nelayan di Pulau. Setelah itu, peneliti mengunjungi kediaman salah satu juragan darat bersama dengan para sawi-sawinya untuk mengamati dan memahami kondisi dan aktivitas kehidupan sehari-hari nelayan teripang. Kala itu, para sawi sedang bergotong-royong memperbaiki dan menyiapkan kapal yang akan digunakan kembali untuk mencari teripang.

Peneliti juga mengamati seluruh aktivitas nelayan yang dimulai sebelum berangkat melaut, memuat perbekalan ke atas kapal sampai pada aktivitas bongkar hasil tangkapan dari melaut. Selain itu, peneliti juga berkesempatan untuk melihat langsung beragam alat tangkap yang digunakan oleh nelayan cumi-cumi dan ikan ketika melaut. Mengamati seluruh rentetan aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir sangat dibutuhkan untuk kelengkapan data penelitian yang diperoleh. Terkecuali pada aktivitas penangkapan peneliti tidak terlibat secara langsung karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan keterampilan khusus dalam melaut. Mengingat pekerjaan ini juga memiliki risiko yang cukup besar,

sehingga hanya orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menggeluti pekerjaan ini.

2.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menemukan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sugiyono (2013) jenis wawancara yang lebih bersifat terbuka dan bebas adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau biasa dikategorikan dengan sebutan wawancara semi-terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Merujuk pada konteks penelitian ini, sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat sekaligus menggunakan pedoman wawancara untuk memudahkan dalam mengarahkan pada fokus pertanyaan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian dan dikembangkan pada saat wawancara. Wawancara ditujukan kepada informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan dianggap dapat memberikan informasi secara mendalam terkait fokus penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai berbagai macam aktor di wilayah masyarakat pesisir. Seperti juragan darat, juragan teripang, nelayan cumi-cumi dan ikan, beberapa nelayan yang tergolong sawi, penyelam dan mantan penyelam serta istri nelayan sampai pada sekertaris komunitas lokal yang rutin melakukan kegiatan rehabilitasi terumbu karang.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menjelaskan kepada informan mengenai maksud dan tujuan dari penelitian ini, kemudian meminta kesediaan informan untuk terlibat dalam penelitian. Jika diperkenankan, peneliti juga meminta persetujuan untuk menggunakan perekam suara selama sesi wawancara berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pengumpulan data dan memudahkan peneliti dalam analisis data nantinya.

2.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara agar hasil penelitian akan lebih kredibel.

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada konteks penelitian ini dokumentasi berupa sekumpulan foto kegiatan dari masyarakat pesisir.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data tematik. Braun & Clarke, (2006) mengungkapkan bahwa teknik analisis data tematik merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (sebagaimana dikutip dalam Heriyanto, 2018).

Dalam analisis tematik, peneliti harus meluangkan waktu untuk berinteraksi lebih dalam dengan data yang telah mereka kumpulkan di lapangan sebelum melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Untuk memberikan detail lebih lanjut mengenai cara melakukan analisis data dengan metode analisis tematik, berikut adalah tahap-tahapannya:

1. Memahami data

Pada tahap pertama ini, peneliti perlu untuk memahami dan menyatu dengan data kualitatif yang diperolehnya. Cara yang efektif untuk lebih menyatu dengan data adalah dengan membaca kembali transkrip wawancara bahkan mendengarkan kembali rekaman wawancara yang sudah dikumpulkan selama proses pengumpulan data. Rekaman wawancara ini menjadi sumber vital dalam proses analisa data karena dari rekaman tersebut peneliti bisa mendapatkan informasi-informasi atau *insights* melalui dialog yang dilakukan bersama para informan. Selain itu, dalam tahap ini, peneliti disarankan untuk membuat catatan pribadi selama membaca transkrip atau pada saat mendengarkan kembali rekaman wawancara. Catatan pribadi tersebut akan membantu peneliti untuk menandai poin-poin penting yang ditemui dalam transkrip atau rekaman serta membantu dalam membaca data sebagai data, artinya tidak hanya memahami data dari apa yang kelihatan di permukaan akan tetapi, sejauh

mana peneliti bisa menelusuri makna yang terkandung di dalam data tersebut.

2. Menyusun Kode

Tahap kedua dalam proses analisis tematik adalah meng-coding data. Meng-coding ini bisa diibaratkan dengan pembaca buku yang berusaha menemukan pikiran utama dari sebuah paragraf. Kode dapat pula diartikan sebagai label yang terdapat dalam data yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menentukan data mana saja dari transkrip wawancaranya yang perlu di kode. Tahapan ini bisa dikategorikan selesai ketika semua data telah selesai dibuatkan kodenya dan semua kode yang memiliki makna atau arti yang sama dijadikan dalam satu group atau kelompok. Peneliti kemudian memberi nama kelompok sesuai dengan isi (kode) di dalam kelompok tersebut.

3. Mencari Tema

Tahap ketiga dalam analisis tematik adalah mencari tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tema tersebut menggambarkan sesuatu yang penting dalam sebuah data yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, penelitalah yang menentukan tema apa yang akan muncul sesuai dengan data yang dimiliki.

2.6 Etika Penelitian

Etika penelitian merujuk pada seperangkat prinsip yang menjadi acuan dalam mempersiapkan, merancang serta melaksanakan penelitian sekaligus memastikan integritas dalam proses pengumpulan data hingga pada tahap penyajian hasil penelitian. Etika penelitian ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, menghormati hak-hak individu, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan serta tanggung jawab akademis. Penelitian yang tidak diintegrasikan dengan etika penelitian dapat memicu berbagai permasalahan yang tidak terduga.

Etika dalam penelitian ini terdiri dari berbagai tahapan. Tahap pertama adalah mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada

Departemen Antropologi Sosial, Universitas Hasanuddin. Selanjutnya tahap kedua, mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian melalui Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (**DPM-PTSP**) Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian mengajukan permohonan izin berikutnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (**DPM-PTSP**) Pemerintah Kota Makassar. Setelah surat izin penelitian telah diterbitkan oleh **DPM-PTSP** Kota Makassar, Langkah selanjutnya adalah meminta dan memperoleh izin dari pihak Kecamatan Sangkarrang dan Kelurahan Pulau Barrang Lompo untuk melakukan penelitian di Pulau tersebut.

Saat berada di lapangan dan sebelum melakukan wawancara atau observasi, peneliti terlebih dahulu memberikan *informed consent* secara transparan dan akuntabel kepada calon informan mengenai topik penelitian, tujuan penelitian dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Akan tetapi, sebelum itu tentunya peneliti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu secara lengkap dan transparan. Peneliti memberi jaminan bahwa identitas informan akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan. Selama di lokasi penelitian peneliti juga menjaga etika dan sopan santun sesuai norma dan tata krama yang berlaku. Bagian terakhir, peneliti dalam seluruh proses pengumpulan dan analisis data dijalankan dengan integritas ilmiah.